

**PROYEK PERUBAHAN
PENINGKATAN KUALITAS REKOMENDASI
KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG
MELALUI PENDEKATAN SPASIAL
"REKOMSPAS"
(REKOMENDASI SPASIAL STRATEGIS)**



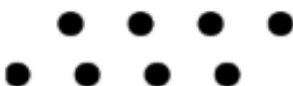
REKOMSPAS

Tepat Sasaran,
Berdasarkan Peta dan Data.

OLEH:

H. HERMIN EKO PURWANTO, S.T., M.T.

*PKN Tingkat II Angkatan XXI
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025*





PROYEK PERUBAHAN

Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI

**PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS REKOMENDASI
KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PENATAAN RUANG MELALUI PENDEKATAN SPASIAL
“REKOMSPAS” (REKOMENDASI SPASIAL STRATEGIS)**



Disusun Oleh :

Nama : H. HERMIN EKO PURWANTO, S.T., M.T.
NIP : 19731026 200501 1 004
NDH : 10
Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Muara Enim

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (BKPSDM) PROVINSI SUMATERA SELATAN 2025**



**LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BPSDMD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

**PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS REKOMENDASI
KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG
MELALUI PENDEKATAN SPASIAL
“REKOMSPAS” (REKOMENDASI SPASIAL STRATEGIS)**

Disusun Oleh :

Nama : H. HERMIN EKO PURWANTO, S.T., M.T.
NIP : 19731026 200501 1 004
NDH : 10
Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Dinyatakan disetujui untuk diseminarkan
Hari Sabtu, Tanggal 25 Oktober 2025, Tempat Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, 25 Oktober 2025

Menyetujui,

Mengetahui
Coach,

Disetujui Oleh :
Mentor,

DR. H. BABAN SOBANDI, SE., M.Si
NIP. 19670501 199303 1 001

Ir. YULIUS, M.Si
NIP. 19670710 199303 1 010



**LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BPSDMD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

**PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS REKOMENDASI KEBIJAKAN
STRATEGIS BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG MELALUI PENDEKATAN
SPASIAL “REKOMSPAS” (REKOMENDASI SPASIAL STRATEGIS)**

Disusun Oleh :

Nama : H. HERMIN EKO PURWANTO, S.T., M.T.
NIP : 19731026 200501 1 004
NDH : 10
Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Dinyatakan telah diseminarkan dan disempurnakan sesuai arahan oleh
Penguji/Narasumber, Mentor dan Coach pada :
Hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2025
Tempat BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Mengesahkan,

Mengetahui
Coach,

Disetujui Oleh :
Penguji,

DR. H. BABAN SOBANDI, SE., M.Si
NIP. 19670501 199303 1 001

DENY JUNANTO, S.E, M.P.P., Ph.D
NIP. 197605212000021001

Menyetujui
Kepala BPSDMD Prov. Sumatera Selatan,

Prof. Dr. H. M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M.
NIP. 197507071997031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan Rancangan Proyek Perubahan ini adalah Meningkatkan kualitas dan efektivitas rekomendasi staf ahli dalam perumusan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan penataan ruang melalui pendekatan spasial.

Solusi yang diusulkan Untuk mengatasi masalah ini, Sekretariat membuat terobosan Inovasi Membangun sebuah sistem penyusunan rekomendasi kebijakan strategis berbasis spasial dengan Peningkatan Kualitas Rekomendasi Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang Melalui Pendekatan Spasial “REKOMSPAS” (Rekomendasi Spasial Strategis)

Manfaat yang diharapkan Bagi Pemerintah yaitu mendapatkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, strategis, dan terukur. Meminimalkan potensi pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai tata ruang, Mendukung pencapaian tata kelola pemerinthan yang lebih baik dan akuntabel. Bagi Staf Ahli yaitu Meningkatkan kompetensi, peran, dan kontribusi staf ahli dalam kebijakan strategis berbasis data, memiliki metodologi dan alat bantu dalam menyusun telaahan dan rekomendasi. Bagi OPD dan Stakeholder Adalah Menjadi dasar koordinasi dan penyelarasan lintas sektor pembangunan dengan acuan spasial yang sama, meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program / kegiatan berbasis wilayah. Bagi Masyarakat Adalah mendorong pembangunan infrastruktur yang tepat guna, tepat lokasi, dan sesuai peruntukan, mengurangi Konflik tata ruang dan mendukung keberlanjutan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan dengan judul “Penerapan Rekomendasi Kebijakan Strategis Berbasis Data Spasial (REKOMSPAS)”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk.II) Angkatan XXI Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

- Bupati Muara Enim, Bapak H. Edison, S.H., M.Hum., dan Wakil Bupati Muara Enim, Ibu Ir. Hj. Sumarni, M.Si., yang telah memberikan dukungan penuh serta kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.
- Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Prof. Dr. H. M. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M., beserta jajaran, yang telah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dengan sangat baik.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Bapak Ir. Yulius, M.Si., selaku mentor yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan proyek perubahan ini.
- Bapak Dr. H. Baban Sobandi, S.E., M.Si., selaku coach, atas motivasi, koreksi, serta pandangan strategis yang berharga dalam penyempurnaan proyek ini.
- Tim BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan pendampingan dan dukungan teknis selama pelaksanaan pelatihan.
- Tim efektif proyek perubahan serta rekan-rekan peserta PKN Tk.II Angkatan XXI Tahun 2025 atas kerja sama, inspirasi, dan semangat kebersamaan yang sangat berarti.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga laporan proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data serta meningkatkan kualitas kebijakan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Muara Enim, Oktober 2025

Penulis,

H. HERMIN EKO PURWANTO, ST., MT

DEKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Sasaran utama proyek perubahan ini adalah terbentuknya mekanisme penyusunan rekomendasi kebijakan strategis berbasis spasial yang terintegrasi. Untuk mencapainya akan dilakukan beberapa langkah pengungkit yaitu penyusunan pedoman teknis yang ditetapkan melalui SK Bupati, pembentukan tim penyusun rekomendasi kebijakan strategis melalui SK Bupati, peningkatan kapasitas staf ahli dalam pemanfaatan data spasial, penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah dan stakeholder, serta pengembangan platform integrasi data spasial yang menghubungkan berbagai sumber data dari OPD dan lembaga terkait.

Program utama yang akan dijalankan meliputi penyusunan pedoman teknis penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis spasial, pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf ahli dan OPD pendukung, pengembangan platform integrasi data spasial, pelaksanaan pilot project penerapan pedoman dan platform pada isu strategis prioritas, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas implementasi.

Pelaksanaan proyek perubahan ini melibatkan berbagai pihak. Sebagai pengarah sekaligus promotor, Bupati Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah akan memastikan dukungan kebijakan dan sumber daya. Pelaksana utama adalah Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dengan dukungan teknis dari Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kominfo, serta OPD teknis lainnya sesuai isu yang diangkat. Stakeholder eksternal yang terlibat meliputi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), akademisi, dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis yang lebih berbobot, berbasis data yang dapat diverifikasi dan berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur serta penataan ruang yang lebih terencana dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DEKRIPSI PROYEK PERUBAHAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Urgensi Proyek Perubahan	1
2. Referensi Sebelumnya.....	2
B. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan	3
1. Tujuan dari Pelaksanaan Proyek Perubahan adalah :.....	3
2. Manfaat Proyek perubahan	4
C. Output dan Outcome Proyek Perubahan.....	5
1. Output.....	5
2. Outcome	6
D. Ruang Lingkup Proyek Perubahan	6
BAB II.....	8
ANALISIS MASALAH.....	8
A. Identifikasi Masalah.....	8
1. Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth)	9
2. Analisis Pohon Masalah (Problem Tree).....	11
B. Tahapan Perubahan Rencana Strategis dan Milestone.....	13
C. Pemetaan Stakeholder	16
D. Strategi Komunikasi Stakeholder	17
E. Strategi Marketing.....	19
F. Mata Pelatihan Pilihan Mendukung Proyek Perubahan	20

G. Strategi Pengembangan Kompetensi Pihak Terdampak	22
H. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategis Pengembangan Potensi Diri.....	22
BAB III	25
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	25
A. Capaian Implementasi Tahapan Kegiatan	25
1. Pembentukan tim kerja proyek Perubahan.....	25
2. Koordinasi dengan OPD Penyedia Data Spasial.....	25
3. Pembentukan Tim Penyusun Rekomendasi	26
4. Penyusunan Pedoman Rekomendasi.....	27
5. Penerapan sistem pendekatan spasial dan Simulasi Penyusunan Rekomendasi.....	27
6. Finalisasi Simulasi	28
7. Uji Coba Satu Dokumen Rekomendasi.....	29
8. Finalisasi & Penyampaian Hasil Uji Coba.....	29
B. Manfaat Implementasi Tahapan Kegiatan.....	30
C. Kepemimpinan Strategis	31
D. Implementasi Strategi Marketing.....	32
E. Keberlanjutan Proyek Perubahan.....	33
F. Pemberdayaan Organisasi Pemberlajaran	34
G. Mata Pelatihan Pilihan	35
BAB IV	37
PENUTUP.....	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Pohon Masalah	12
Gambar 2. Pemetaan Stakeholder	17
Gambar 3. Rekap Nilai Sikap Prilaku Peserta	23
Gambar 4. Pembentukan Tim Kerja.....	25
Gambar 5. Koordinasi OPD	26
Gambar 6. Pembentukan Tim Penyusun	26
Gambar 7. FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	27
Gambar 8. Pemilihan Isu Strategis.....	28
Gambar 9. Finalisasi Kebijakan	28
Gambar 10. Uji Coba Rekomendasi.....	29
Gambar 11. Finalisasi dan Penyampaian Uji Coba	30
Gambar 12. Peta Perubahan Stakeholder	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Rekomendasi/Telahaan Staf Ahli	9
Tabel 2.2 Analisis USG Terhadap Isu Strategis	10
Tabel 2.3 Strategi Komunikasi Stakeholder	17
Tabel 2.4 Strategi Pengembangan Kompetensi.....	22
Tabel 2.5 Strategi Pengembangan Kompetensi.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Urgensi Proyek Perubahan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran staf ahli kepala daerah bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan memiliki posisi strategis dalam memberi masukan dan rekomendasi kebijakan yang akurat, komprehensif, dan berbasis bukti. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan kepala daerah terhadap isu-isu strategis seperti pembangunan infrastruktur, penataan ruang, mitigasi bencana, hingga pengendalian pemanfaatan lahan. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa kualitas rekomendasi yang dihasilkan masih belum optimal.

Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain masih minimnya pemanfaatan data spasial dan peta tematik dalam proses analisis, sehingga rekomendasi yang disampaikan cenderung bersifat umum dan kurang presisi dalam menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, integrasi data lintas OPD masih terbatas, mengakibatkan informasi yang digunakan parsial dan belum mencerminkan gambaran menyeluruh. Ketiadaan pedoman baku dalam penyusunan rekomendasi berbasis spasial serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi geospasial semakin memperlemah kualitas rekomendasi yang diberikan.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya mekanisme penyusunan rekomendasi staf ahli yang sepenuhnya berbasis data spasial yang akurat, didukung oleh peta tematik, data statistik, dan analisis multi dimensi yang relevan. Hal ini memerlukan pedoman baku yang dapat diacu, tim penyusun rekomendasi, sistem yang terintegrasi dengan basis data lintas sektor, serta peningkatan kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi geospasial dan komunikasi kebijakan. Dukungan

penuh dari OPD terkait seperti Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Diskominfo, BPN, BIG serta pihak akademisi menjadi kunci keberhasilan untuk menghasilkan rekomendasi yang presisi, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proyek perubahan ini memiliki relevansi yang kuat dengan agenda reformasi berdampak. Melalui penerapan rekomendasi berbasis spasial, kualitas kebijakan publik dapat meningkat secara signifikan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi data dan kolaborasi lintas sektor sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance), yang akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Dampak akhirnya adalah terwujudnya kebijakan infrasetruktur dan tata ruang yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pemerataan pembangunan, pengurangan resiko bencana, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dengan demikian, proyek perubahan ini bukan hanya memperkuat kapasitas staf ahli dalam memberikan rekomendasi yang berkualitas, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya Reformasi Birokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Referensi Sebelumnya

Sejumlah inisiatif dan inovasi di daerah lain maupun di lingkup pemerintah pusat dapat menjadi bahan rujukan serta perspektif baru bagi proyek perubahan ini, antara lain:

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial dalam Perencanaan Infrastruktur.
Beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan sistem berbasis peta digital untuk memetakan kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur. Contohnya Geoportal PUPR yang memadukan data spasial untuk perencanaan

dan monitoring proyek.

2. Penyusunan Panduan Rekomendasi Kebijakan Strategis Berbasis Data. Kementrian/lembaga tertentu, seperti Bappenas telah memiliki Policy Brief Guideline yang berisi format, metodologi, dan standar kualitas dokumen rekomendasi kebijakan. Model ini dapat diadaptasi untuk peran staf ahli di daerah.
3. Pembentukan Tim Analisis Kebijakan Daerah (TAKD). Sebagai contoh, Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Tim Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan yang bisa menjadi acuan untuk merancang tim analisis kebijakan yang sistematis dalam fungsi spesifik seperti infrasetruktur atau penataan ruang.

Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa kunci peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan terletak pada tiga hal: dukungan tim yang kompeten, adanya panduan baku, dan pemanfaatan teknologi analisis spasial. Perspektif ini sejalan dengan arah proyek perubahan yang sedang disusun, sehingga implementasinya di Kabupaten Muara Enim akan menjadi penguatan peran staf ahli berbasis inovasi yang sudah terbukti berhasil di tempat lain.

Melalui proyek perubahan ini, diharapkan staf ahli memiliki sistem kerja berbasis tim pendukung, dilengkapi pedoman baku penyusunan rekomendasi, serta alat bantu analisis spasial untuk memperkuat substansi rekomendasi. Dengan demikian rekomendasi yang dihasilkan akan lebih relevan, berbasis bukti, dan memberikan dampak nyata bagi pengambilan keputusan strategis di bidang infrastruktur dan penataan ruang.

B. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

1. Tujuan dari Pelaksanaan Proyek Perubahan adalah :

1. Tujuan Jangka Pendek:

- a. Menyusun dan menerapkan sistem pendekatan spasial dalam proses

penyusunan rekomendasi kebijakan strategis di bidang infrastruktur dan penataan ruang.

- b. Membangun tim yang mendukung pelaksanaan tugas staf ahli dalam penyusunan rekomendasi kebijakan strategis.
- c. Menyusun panduan/pedoman baku dalam penyusunan rekomendasi staf ahli berbasis data spasial.

Dengan adanya sistem, tim pendukung dan panduan baku, kualitas rekomendasi akan lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membangun kepercayaan pimpinan dalam mengimplementasikan masukan staf ahli.

2. Tujuan Jangka Menengah:

- a. Melakukan Penguatan koordinasi lintas OPD
- b. Melakukan Replikasi pendekatan pada bidang kebijakan lain
- c. Melakukan Integrasi data spasial dalam perencanaan daerah
- d. Menyusun laporan evaluasi tengah tahun
- e. Melakukan Pengembangan dashboard sederhana berbasis spasial

3. Tujuan Jangka Panjang:

- a. Melakukan Integrasi pendekatan spasial ke dalam dokumen perencanaan tahunan
- b. Melakukan digitalisasi penuh sistem rekomendasi staf ahli berbasis spasial
- c. Melakukan konektivitas penuh dengan data spasial OPD teknis
- d. Melaksanakan Monitoring kualitas rekomendasi spasial
- e. Melakukan pengusulan replikasi ke seluruh kebijakan lintas sektor

2. Manfaat Proyek perubahan

1. Bagi Pemerintah

- a. Mendapatkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, strategis, dan

terukur.

- b. Meminimalkan potensi pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai tata ruang.
- c. Mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

2. Bagi Staf Ahli

- a. Meningkatkan kompetensi, peran, dan kontribusi staf ahli dalam kebijakan strategis berbasis data.
- b. Memiliki metodologi dan alat bantu dalam menyusun telaahan dan rekomendasi.

3. Bagi OPD dan Stakeholder

- a. Menjadi dasar koordinasi dan penyelarasan lintas sektor pembangunan dengan acuan spasial yang sama.
- b. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau kegiatan berbasis wilayah.

4. Bagi Masyarakat

- a. Mendorong pembangunan infrastruktur yang tepat guna, tepat lokasi, dan sesuai peruntukan.
- b. Mengurangi konflik tata ruang dan mendukung keberlanjutan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Output dan Outcome Proyek Perubahan

1. Output

- Pedoman penyusunan rekomendasi kebijakan strategis bidang infrastruktur dan penataan ruang.
- Tim penyusun rekomendasi kebijakan strategis bidang infrastruktur dan penataan ruang.
- Instrumen analisis kebijakan strategis bidang infrastruktur dan penataan

ruang berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis).

2. Outcome

- Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan yang disampaikan staf ahli.
- Pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur lebih sinkron dengan rencana tata ruang.
- Penguatan peran staf ahli sebagai mitra strategis kepala daerah dalam pengambilan keputusan berbasis data.
- Terwujudnya kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan berbasis wilayah.

D. Ruang Lingkup Proyek Perubahan

Rancangan proyek perubahan “Peningkatan Kualitas Rekomendasi Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang melalui Pendekatan Spasial” merupakan inisiatif strategis yang selaras dengan tema “Penguatan Birokrasi yang Inovatif untuk Mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Pusat Ketahanan Ekonomi”. Proyek perubahan ini memposisikan staf ahli kepala daerah sebagai pemimpin strategis yang berperan aktif merumuskan kebijakan berbasis data spasial untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi daerah, khususnya melalui optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang.

Sejalan dengan subtema “Membangun Kolaborasi Stakeholder Multihelix dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi” proyek perubahan ini diarahkan untuk membangun mekanisme kerja baku yang menghubungkan staf ahli, OPD teknis, akademisi, dunia usaha dan masyarakat dalam satu ekosistem kolaborasi berbasis data spasial. Sistem integrasi data yang dihasilkan akan memungkinkan analisis yang lebih presisi, sehingga kebijakan infrastruktur dan penataan ruang dapat mengarah pada penguatan konektivitas wilayah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

Sasaran perubahan:

1. Tersedianya mekanisme kerja baku antara staf ahli, OPD teknis dan Bappeda dalam penyusunan rekomendasi kebijakan strategis berbasis spasial.
2. Terciptanya sistem integrasi data spasial yang dapat digunakan secara lintas sektor untuk analisis kebijakan infrastruktur dan penataan ruang.
3. Peningkatan kapasitas staf ahli dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi analisis spasial.
4. Meningkatkan kualitas rekomendasi yang bersifat terukur, berbasis data dan relevan dengan perencanaan pembangunan daerah.
5. Terbangunya sinergi kolaboratif antar OPD, akademisi, dan stakeholder lainnya untuk memperkuat validasi data dan rekomendasi.

Batasan:

1. Fokus pada kebijakan strategis di bidang infrastruktur dan penataan ruang, tidak mencakup semua sektor pembangunan daerah.
2. Pendekatan spasial dibatasi pada data yang tersedia dan dapat diakses secara legal oleh pemerintah daerah.
3. Cakupan wilayah analisis terbatas pada lingkungan administrasi kabupaten sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Kendala:

1. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur data dan perangkat lunak.
2. Akses dan interoperabilitas data yang masih bergantung pada kebijakan instansi pemilik data.
3. Resistensi perubahan dari sebagian pihak yang sudah terbiasa dengan pola kerja konvensional tanpa integrasi spasial.
4. Waktu implementasi terbatas sesuai kerangka proyek perubahan, sehingga penerapan penuh memerlukan tahapan lanjutan.

BAB II

ANALISIS MASALAH

A. Identifikasi Masalah

Staf ahli memiliki peran strategis sebagai pemberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada kepala daerah, khususnya terkait isu-isu pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan penataan ruang. Peran ini menjadin krusial mengingat sektor infrastruktur dan penataan ruang memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan daerah, kanektivitas wilayah, dan tata kelola ruang yang berkelanjutan. Namun, realitas pelaksanaan tugas staf ahli saat ini belum optimal dan menunjukkan adanya tantangan yang berpengaruh terhadap rekomendasi yang dihasilkan. Adapun permasalahan-prmasalahan yaang dihadapi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya tumpang tindih peran dengan asisten

Dalam praktiknya pembagian tugas antara staf ahli dengan asiaten belum terdefinisi dengan jelas, sehingga kerap terjadi irisan kewenangan dan beban kerja. Hali ini menyebabkan rekomendasi kebijakan dari staf ahli tidak selalu berdampak optimal, karena sebagian isu strategis sudah ditangani oleh asisten melalui koordinasi perangkat daerah.

2. Masih rendahnya kualitas kebijakan strategis staf ahli

Rekomendasi yang disampaikan belum sepenuhnya berbasis data, analisis mendalam, maupun pendekatan teknis yang kuat, sehingga sulit menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan strategis.

3. Peran staf ahli cenderung bersifat seremonial dan administratif

Sebagian besar waktu terserap pada kegiatan protokoler, koordinasi umum, atau penugasan administratif, sehingga fungsi analitis dan strategi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan menjadi kurang menonjol.

Tabel 2.1 Jumlah Rekomendasi/Telaahan Staf Ahli

Tahun	Jumlah telaahan	Telaahan Berbasis Data Spasial	Hanya ada satu telaahan yang mengandung visualisasi spasial
2022	3	0	
2023	4	0	
2024	4	1	

1. Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth)

Untuk menentukan fokus permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani dalam proyek perubahan, dilakukan analisis metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). metode ini digunakan untuk meniali sejauh mana suatu masalah memiliki tingkat urgensi (kebutuhan segera untuk diatasi), seriousness (tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan, dan grouwth (potensi perkembangan masalah jika tdak segera ditangani)

Dengan pendekatan USG, setiap isu strategis yang dihadapi staf ahli dianalisis secara obyektif, sehingga dapat ditentukan prioritas masalah utama yang perlu menjadi fokus intervensi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa dari beberapa permasalahan yang teridentifikasi, terdapat isu dengan skor tertinggi yang harus segera mendapatkan perhatian karena memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas rekomendasi kebijakan strategis dan kredibilitas peran staf ahli di mata pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.2 Analisis USG Terhadap Isu Strategis

Masalah	U (Urgensi) Kebutuhan segera ditangani (skor 1 – 5)	S (Seriousness) dampak terhadap kinerja organisasi (skor 1 – 5)	G (Growth) Potensi memburuk jika dibiarkan (skor 1 – 5)	Total	Keterangan
Masih rendahnya kualitas rekomendasi kebijakan strategis staf ahli	5	5	4	14	Prioritas 1
Masih adanya tumpang tindih peran dengan asisten	4	4	3	11	Prioritas 3
Peran staf ahli cenderung bersifat seremonial dan administratif	4	4	4	12	Prioritas 2

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas staf ahli, terdapat tiga isu strategis. Dari ketiga isu strategis tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth), yaitu:

1. Masih adanya tumpang tindih peran dengan asisten

Permasalahan ini memiliki urgensi yang cukup tinggi (skor 4) karena berdampak pada kejelasan tugas, koordinasi, dan efektifitas kerja dilingkungan sekretariat daerah. Tingkat keseriusan juga dinilai tinggi (skor 4) karena potensi duplikasi pekerjaan dapat menghambat kecepatan penyusunan rekomendasi dan menciptakan ketidakefisienan sumber daya. Dari aspek pertumbuhan masalah, jika tidak segera diatasi (skor 3), tumpang tindih ini berpotensi semakin meluas seiring meningkatnya kompleksitas isu strategis yang harus ditangani. Total skor permasalahan ini adalah 11, yang menempatkannya pada prioritas ketiga.

2. Masih rendahnya kualitas rekomendasi kebijakan strategis staf ahli

Isu ini menjadi prioritas utama dengan total skor 14. tingkat urgensi sangat tinggi (skor 5) karena kualitas rekomendasi berpengaruh langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan kepala daerah. Tingkat keseriusannya juga sangat tinggi (skor 5) sebab rekomendasi yang lemah dapat menurunkan kredibilitas staf ahli, memengaruhi ketepatan sasaran kebijakan, dan pada

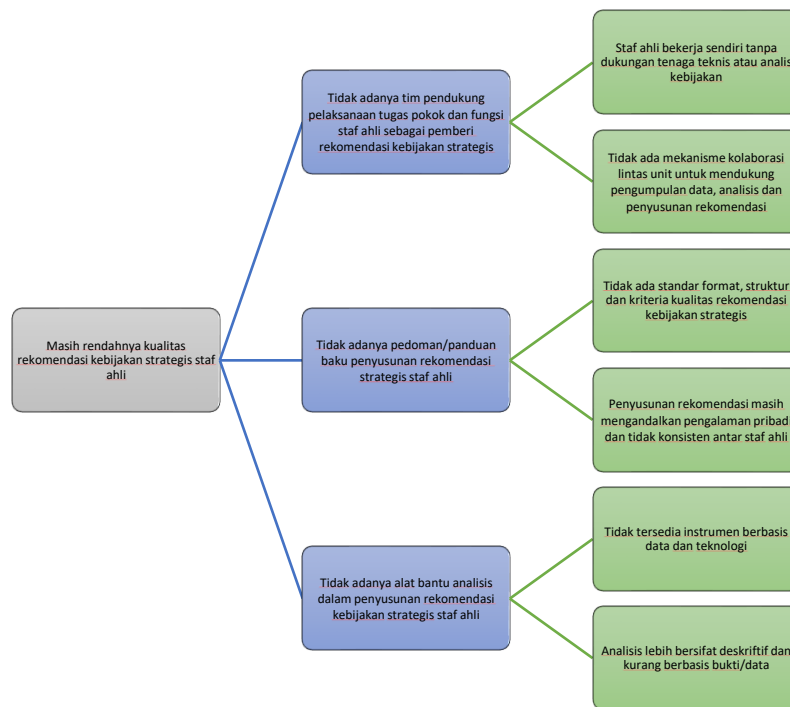
akhirnya berdampak negatif terhadap pembangunan daerah. Dari sisi pertumbuhan masalah jika tidak segera ditangani (skor 4), kualitas rekomendasi akan semakin menurun dan dapat mengikis kepercayaan pemangku kepentingan.

3. Peran staf ahli cenderung bersifat seremonial dan administratif

Permasalahan ini memiliki total skor 12, menempatkannya pada prioritas kedua. Urgensinya tinggi (skor 4) karena membatasi fungsi staf ahli yang seharusnya menjadi penggerak analisis strategis berbasis data. Keseriusannya juga tinggi (skor 4) karena fungsi strategis staf ahli dapat terpinggirkan, mengurangi nilai tambah jabatan tersebut. Dari aspek pertumbuhan masalah (skor 4), jika tidak diatasi akan membuat staf ahli hanya menjadi simbol formal tanpa kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan strategis merupakan fokus utama yang harus segera diintervensi, diikuti oleh penguatan peran strategis staf ahli, dan selanjutnya penataan kembali pembagian peran agar tidak tumpang tindih dengan asisten.

2. Analisis Pohon Masalah (Problem Tree)

Untuk memahami akar persoalan yang menyebabkan rendahnya kualitas rekomendasi kebijakan strategis staf ahli, diperlukan suatu analisis yang komprehensif. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pohon masalah (problem tree). Metode ini membantu mengurai persoalan utama menjadi bagian-bagian yang lebih detail, mulai dari penyebab (akar masalah), inti persoalan (batang masalah), hingga dampak yang ditimbulkan (cabang dan daun masalah).



Gambar 1. Analisis Pohon Masalah

Masalah Utama (Batang Pohon) :

Masih rendahnya kualitas rekomendasi kebijakan strategis staf ahli

Penyebab Utama (Akar Pohon) :

1. Tidak adanya tim yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagai pemberi rekomendasi kebijakan strategis
 - a. Staf ahli bekerja sendiri tanpa dukungan tenaga teknis atau analisis kebijakan
 - b. Tidak ada mekanisme kolaborasi lintas unit untuk mendukung pengumpulan data, analisis dan penyusunan rekomendasi.
2. Tidak adanya pedoman/panduan baku dalam penyusunan rekomendasi kebijakan strategis staf ahli.
 - a. Tidak ada standar format, struktur dan kriteria kualitas rekomendasi kebijakan strategis.
 - b. Penyusunan rekomendasi masih mengandalkan pengalaman pribadi dan tidak konsisten antar staf ahli.
3. Tidak adanya alat bantu analisis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan

strategis staf ahli.

- a. Tidak tersedia instrumen berbasis data dan teknologi.
- b. Analisis lebih bersifat deskriptif dan kurang berbasis bukti/data.

Akibat masalah (dahan dan daun) :

1. Rekomendasi kebijakan strategis kurang komprehensif, tidak berbasis data, dan sulit diimplementasikan.
2. Pengambilan keputusan pimpinan kurang optimal karena rekomendasi tidak memuat analisis mendalam.
3. Potensi pembangunan infrastruktur dan penataan ruang tidak termanfaatkan secara maksimal.

Dari hasil analisa isu strategis dengan menggunakan metode analisa USG diperoleh masalah utama yang perlu segera ditangani adalah Masih rendahnya kualitas rekomendasi kebijakan strategis staf ahli. Dimana dari hasil analisa pohon masalah yang menjadi penyebab utama dari hal tersebut adalah pertama, tidak adanya tim yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagai pemberi rekomendasi kebijakan strategis, kedua tidak adanya pedoman/panduan baku dalam penyusunan rekomendasi kebijakan strategis staf ahli, dan ketiga, tidak adanya alat bantu analisis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan strategis staf ahli.

Dari hasil analisa tersebut di atas, strategi yang akan dilakukan adalah dengan membangun sebuah sistem penyusunan rekomendasi kebijakan strategis berbasis spasial. Strategi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan strategis bidang infrastruktur dan penataan ruang melalui pendekatan spasial. Dengan terobosan inovasinya adalah **REKOMSPAS** (Rekomendasi Spasial Strategis).

B. Tahapan Perubahan Rencana Strategis dan Milestone

Tahapan perubahan rencana strategis yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Tahapan Jangka Pendek (1 - 2 Bulan)
 - a. Pembentukan tim kerja proyek perubahan
 - Menetapkan SK Tim Kerja
 - Menentukan peran dan tugas anggota
 - Menyusun jadwal kerja awal
 - rapat perdana untuk pemahaman visi, misi, tujuan
 - b. Koordinasi dengan OPD Penyedia Data Spasial
 - Identifikasi OPD pemilik data spasial
 - Mengirim surat & undangan rapat
 - Rapat Koordinasi lintas OPD
 - Menyusun daftar kebutuhan & format data
 - c. Pembentukan Tim Penyusun Rekomendasi
 - Menentukan personel penyusunan rekomendasi
 - Menetapkan SK Tim penyusun rekomendasi
 - Rapat koordinasi antar tim
 - d. Penyusunan Pedoman Rekomendasi
 - Menyusun draft pedoman (struktur, format, indikator, metode analisis)
 - Review internal pedoman
 - FGD untuk masukan pihak terkait
 - Finalisasi pedoman & SK pedoman penyusunan rekomendasi
 - e. Penerapan sistem pendekatan spasial dan Simulasi Penyusunan Rekomendasi
 - Memilih isu strategis
 - Mengumpulkan data spasial sesuai pedoman
 - Analisis data & draft rekomendasi
 - f. Finalisasi Simulasi
 - Memperbaiki hasil simulasi
 - Cek kesesuaian dengan pedoman

- Menyusun visualisasi (peta tematik, grafik, tabel)
 - g. Uji Coba Satu Dokumen Rekomendasi
 - Menentukan isu strategis aktual
 - Mengumpulkan & menganalisis data
 - Menyusun draft dokumen rekomendasi lengkap
 - h. Finalisasi & Penyampaian Hasil Uji Coba
 - Perbaikan akhir dokumen rekomendasi
 - Penyerahan dokumen rekomendasi
 - Menyusun laporan capaian proyek perubahan
2. Tahapan Jangka Menengah (3 - 12 Bulan)
- a. Penguatan koordinasi lintas OPD
 - SOP kolaborasi staf ahli dengan OPD teknis
 - b. Replikasi pendekatan pada bidang kebijakan lain
 - Penerapan pendekatan spasial di minimal satu bidang lain
 - c. Integrasi data spasial dalam perencanaan daerah
 - d. Penyusunan laporan evaluasi tengah tahun
 - Laporan evaluasi
 - e. Pengembangan dashboard sederhana berbasis spasial
 - Prototipe dashboard atau sistem akses peta tematik
3. Tahapan Jangka Panjang (1 - 2 tahun)
- a. Integrasi pendekatan spasial ke dalam dokumen perencanaan tahunan
 - Rekomendasi spasial menjadi standar praktik
 - b. Digitalisasi penuh sistem rekomendasi staf ahli berbasis spasial
 - Sistem informasi spasial staf ahli
 - c. Konektivitas penuh dengan data spasial OPD teknis
 - Sistem kerja kolaboratif lintas sektor
 - d. Monitoring kualitas rekomendasi spasial
 - Laporan capaian proyek perubahan

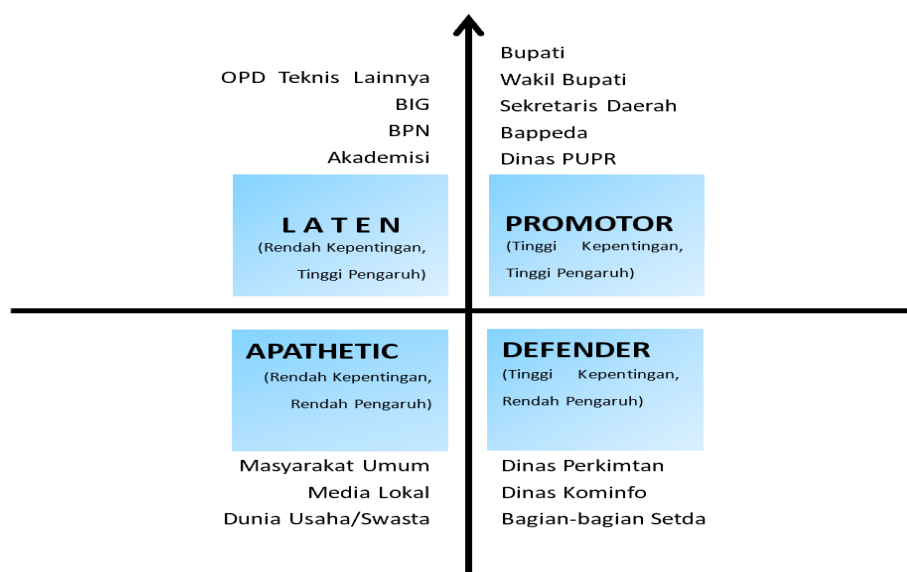
- e. Pengusulan replikasi ke seluruh kebijakan lintas sektor
 - Rencana pengembangan berkelanjutan

C. Pemetaan Stakeholder

Berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan tersebut, maka selanjutnya akan diketahui kelompok stakeholder berdasarkan besarnya pengaruh dan kepentingan terhadap proyek perubahan, dikategorikan dalam kelompok:

- a. Promoters (Key Players), yaitu stakeholder yang sangat dibutuhkan dan yang memiliki kepentingan tinggi terhadap upaya dan kekuatan untuk membantu keberhasilan proyek perubahan, atau kategori kepentingan tinggi, pengaruh tinggi.
- b. Defenders (Keep Informed), yaitu stakeholder yang perlu dalam Proyek Perubahan dan yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan Proyek Perubahan, serta menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya keberhasilan proyek perubahan ini, atau kategori memiliki kepentingan, pengaruh rendah.
- c. Latents (Keep Satisfied), yaitu stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam upaya perubahan ini, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi upaya perubahan ini, atau kategori kepentingan rendah, pengaruh tinggi.
- d. Apathetics (Minimal Effort), yaitu stakeholder yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan terhadap proyek perubahan ini, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan ini, atau kategori kepentingan rendah, pengaruh rendah.

Hasil identifikasi atau penggolongan stakeholders dilakukan untuk mengetahui penempatan posisi stakeholders, sehingga dapat dengan mudah menganalisa dan memahami seberapa besar pengaruh stakeholders dalam proyek perubahan ini. Analisis stakeholders dilakukan dengan menggunakan matriks/kuadran kelompok stakeholders berdasarkan tingkat pengaruh (Influence) dan kepentingannya (Interest) yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Pemetaan Stakeholder

D. Strategi Komunikasi Stakeholder

Tabel 2.3 Strategi Komunikasi Stakeholder

STAKEHOLD ER	EKSPEKTASI TERHADAP PROPER	STRATEGI KOMUNIKASI
Bupati Wakil Bupati	◆ Mendapatkan rekomendasi kebijakan yang akurat dan berbasis data spasial yang akurat dan mudah dipahami untuk mendukung keputusan	◆ Laporan berkala, presentasi dengan petatematik dan infografis ringkas

Sekretaris Daerah Bappeda Dinas PUPR	pembangunan. ◆ Mendapatkan informasi detail terkait program prioritas dan tindak lanjut kebijakan strategis dibidang infrastruktur dan penataan ruang. ◆ Terjaminnya koordinasi lintas OPD dan sinkronisasi program. ◆ Integrasi rekomendasi ke dalam perencanaan daerah (RPJMD/ RKPDP) dan sinkronisasi data spasial. ◆ Kesesuaian rekomendasi dengan kondisi teknis infrastruktur di lapangan.	◆ Paparan singkat pada rapat koordinasi ◆ Rapat koordinasi rutin ◆ Forum perencanaan terpadu, berbagi data GIS dan FGD sinkronisasi program ◆ FGD teknis tematik, verifikasi lapangan bersama dan peta prioritas pembangunan
Dinas Perkimtan Dinas Kominfo Bagian-bagian Setda	◆ Kebijakan penataan permukiman konsisten dengan RTRW dan RDTR ◆ Dukungan infrastruktur teknologi dan publikasi inovasi REKOMSPAS ke masyarakat. ◆ Mendukung aspek hukum,	◆ Review dokumen, koordinasi teknis dan konsultasi berbasis peta tematik. ◆ Rapat koordinasi publikasi dan publikasi di media resmi. ◆ Konsultasi lintas bagian dan koordinasi administratif

	administrasi dan keuangan dalam implementasi REKOMSPAS	
OPD Teknis Lainnya	◆ Rekomendasi yang relevan dengan sektor mereka dan berbasis data aktual	◆ Rapat teknis sektoral, berbagi data dan integrasi program kerja
Masyarakat/Dunia Usaha/Media	◆ Kepastian terkait arah Pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	◆ Sosialisasi publik, forum konsultasi, publikasi rencana strategis dan konferensi pers

E. Strategi Marketing

Strategi marketing terhadap Proyek Perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik yaitu **4P1C (product, price, promotion, place, dan customer)** sebagai berikut :

a. Product (Produk/Jasa):

REKOMSPAS (Rekomendasi Spasial Strategis) adalah inovasi berupa sistem dan metodologi penyusunan, rekomendasi kebijakan strategis di bidang infrastruktur dan penataan ruang dengan basis data spasial.

Fitur utama :

- Pedoman resmi penyusunan rekomendasi berbasis spasial
- Peta tematik interaktif untuk analisis kebijakan
- Tim penyusun rekomendasi berbasis spasial

b. Price (Harga/Nilai):

Karena ini layanan publik, nilai yang ditonjolkan adalah Value for policy (nilai tambah untuk kebijakan), bukan harga uang. Strategi harga diartikulasikan dalam bentuk :

- Efisiensi waktu pengambilan keputusan
- Pengurangan kesalahan kebijakan akibat minimnya data spasial
- Peningkatan kredibilitas staf ahli di mata pimpinan
- Potensi replikasi di bidang kebijakan lainnya

c. Place (Distribusi):

Distribusi REKOMSPAS dilakukan melalui :

- Portal data spasial internal
- Presentasi langsung kepada pimpinan daerah
- Forum koordinasi lintas OPD

d. Promotion (Promosi):

Strategi promosi menekankan pada edukasi dan advokasi :

- Workshop penggunaan REKOMSPAS bagi staf ahli dan OPD teknis
- Publikasi di media internal
- Testimoni pimpinan daerah terkait manfaat REKOMSPAS
- Pameran inovasi daerah dan kompetisi inovasi pelayanan publ

e. Customer (Pelanggan/Penerima Manfaat):

Primer : Kepala Daerah, Sekda, dan Pimpinan OPD sebagai pengambil Keputusan strategis.

Sekunder : Akademisi dan pihak swasta yang berkolaborasi dalam pembangunan.

Tersier : Masyarakat yang menerima manfaat dari kebijakan yang lebih tepat sasaran.

F. Mata Pelatihan Pilihan Mendukung Proyek Perubahan

Rencana Mata Pelatihan Pilihan Mendukung Proyek Perubahan memuat daftar 3 (tiga) rencana mata pelatihan pilihan yang mendukung fokus atau substansi proyek perubahan yang sudah disetujui *coach*. Mata Pelatihan dapat diambil dari *Learning Management System* LAN atau memilih pelatihan lain yang relevan di

luar LMS LAN. Berikut Rencana Mata Pelatihan Pilihan yang dipilih untuk proyek perubahan REKOMSPAS ini:

1. Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi

Dalam proses penyusunan kebijakan infrastruktur dan penataan ruang, staf ahli berinteraksi dengan generasi senior yang memiliki pengalaman, jaringan dan regulasi yang kuat serta generasi Muda yang cenderung cepat dalam menguasai teknologi dan data spasial. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada perbedaan gaya kerja, cara komunikasi dan perbedaan prioritas sehingga sering memicu miskomunikasi yang bisa menurunkan kualitas rekomendasi. Pelatihan ini sangat relevan, karena penyusunan rekomendasi kebijakan strategis melibatkan tim lintas usia dari generasi senior yang berpengalaman hingga generasi muda yang melek teknologi.

2. Keterampilan Digital Dalam Penyusunan Kebijakan

Dalam proses penyusunan kebijakan infrastruktur dan penataan ruang, proses penyusunannya akan lebih kuat jika disertai dashboard data interaktif, peta digital yang rinci sesuai kebutuhan stakeholder serta infografis hasil analisis spasial. Pelatihan keterampilan digital akan membekali staf ahli dalam menyajikan data dengan visualisasi yang persuasif.

3. Pengelolaan Konflik Kepentingan

Kebijakan infrastruktur dan penataan ruang berkaitan dengan kepemilikan lahan, investasi dunia usaha dan rentan terhadap permasalahan lingkungan hidup. Kondisi ini tentunya menyebabkan pengambilan kebijakan berpotensi mengalami konflik kepentingan sehingga dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan, staf ahli perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam manajemen resiko terjadinya konflik kepentingan.

Daftar Mata Pelatihan ini dilengkapi penjelasan relevansi atau manfaat bagi proyek perubahan serta sumber belajar dalam LMS atau di luar LMS. Dalam pelaksanaan proyek perubahan, daftar ini dimungkinkan untuk berubah dengan

persetujuan coach untuk mengoptimalkan kemanfaatannya bagi proyek perubahan.

G. Strategi Pengembangan Kompetensi Pihak Terdampak

Dalam rangka mendukung implementasi dari proyek perubahan, diperlukan upaya penguatan kompetensi dari seluruh pihak yang terdampak. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran strategis yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kontribusinya, sehingga pengembangan kompetensi perlu dirancang secara terarah dan sistematis.

Strategi pengembangan kompetensi ini disusun untuk memastikan bahwa staf ahli, OPD teknis dan tim penyusun rekomendasi memperoleh peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian diharapkan terbentuk sinergi antar pemangku kepentingan yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis yang lebih berkualitas, berbasis data spasial, aplikatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Tabel 2.4 Strategi Pengembangan Kompetensi

Sasaran	Perubahan Kompetensi	Strategi Pengembangan
Staf Ahli, Bappeda, OPD Teknis	Peningkatan pemahaman spasial	Pelatihan literasi dasar spasial
Staf Ahli & Tim Penyusun Rekomendasi	Telaahan berbasis spasial	Pelatihan penyusunan telaahan kebijakan berbasis spasial
Staf Ahli	Peningkatan kompetensi melalui praktik langsung	Monitoring teknis dari tenaga ahli

H. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategis Pengembangan Potensi Diri

Pada bagian ini dijelaskan hasil monitoring pemetaan sikap perilaku Kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri dengan 2 (dua) poin penting yaitu hasil pemetaan dan rencana strategis pengembangan potensi diri.

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dilakukan oleh peserta dan mentor dengan menggunakan instrument yang sama.

Kedua hasil assesment ini menjadi bagian dari proses monitoring untuk mendapatkan kesepakatan kebutuhan pengembangan potensi (gap hasil pemetaan) dan juga strategi meningkatkan potensi peserta untuk menutup gap tersebut. Strategi dapat diprioritaskan pada aspek tertentu atau keseluruhan aspek yang diputuskan dalam proses mentoring. Penjelasan mengenai rencana pengembangan potensi diri sebagai tindak lanjut dari self assessment peserta sebagai berikut:

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA PKN TK. II ANGKATAN XXI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Nama Peserta	: HERMIN EKO PURWANTO, S.T., M.T	Nama Mentor	: Ir. YULIUS, M.Si
NIP	: 197310262005011004	NIP	: 196707101993031010
Jabatan	: STAF AHLI EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBAHUNAN	Jabatan	: SEKRETARIS DAERAH
Instansi	: PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM	Instansi	: PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
Program	: PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II TAHUN 2025		

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	9,24	9,20	9,21	9,22	Istimewa
Mentor	9,26	9,23	9,26	9,25	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,26	9,22	9,24	9,24	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	

Keterangan Kualifikasi

9,00-10	Istimewa
7-8,99	Baik
6-6,99	Cukup
3-4,99	Kurang
1-2,99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku

9,24
Kualifikasi: Istimewa

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi pratama
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama

Gambar 3. Rekap Nilai Sikap Prilaku Peserta

Dari hasil pemetaan sikap dan perilaku didapatkan nilai sebagai berikut : integritas 9,26 (istimewa), kerja sama 9,22 (istimewa), dan mengelola perubahan 9,24 (istimewa) dengan nilai akhir sikap perilaku 9,24 (istimewa), dimana nilai terendah ada pada aspek kerjasama. Sebagai tindak lanjut dari self assessment tersebut, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal.

Tabel 2.5 Strategi Pengembangan Kompetensi

Aspek Potensi Diri	Strategi
Integritas	● Konsistensi dan pengambilan keputusan berbasis data Meningkatkan kredibilitas staf ahli dalam memberika rekomendasi berbasis spasial melalui peer review internal sebelum rekomendasi disampaikan ke pimpinan
Kerjasama	● Pendekatan partisipatif Membangun sinergi lintas OPD melalui workshop bersama untuk interpretasi peta dan analisis spasial
Mengelola perubahan	● Implementasi proyek secara bertahap dan sistematis Memastikan transisi dari rekomendasi konvensional ke berbasis spasial berjalan efektif melalui pelatihan GIS dan analisis spasial

BAB III

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Implementasi Tahapan Kegiatan

1. Pembentukan tim kerja proyek Perubahan

Tahapan awal implementasi dimulai dengan pembentukan tim kerja melalui penetapan SK, pembagian peran dan tugas, penyusunan jadwal kerja, serta rapat perdana untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan bersama.



Gambar 4. Pembentukan Tim Kerja

2. Koordinasi dengan OPD Penyedia Data Spasial

Pada minggu kedua, kegiatan difokuskan pada koordinasi lintas OPD untuk mengidentifikasi pemilik data spasial dan menyusun kebutuhan serta format data yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi.



Gambar 5. Koordinasi OPD

3. Pembentukan Tim Penyusun Rekomendasi

Pada minggu ketiga, kegiatan difokuskan pada pembentukan tim penyusun rekomendasi melalui penetapan personel, penerbitan SK tim, serta pelaksanaan rapat koordinasi untuk menyatukan langkah kerja antar anggota.



Gambar 6. Pembentukan Tim Penyusun

4. Penyusunan Pedoman Rekomendasi

Pada minggu keempat, fokus kegiatan diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan pedoman melalui pelaksanaan FGD bersama pihak terkait untuk mendapatkan masukan substansial, yang kemudian dilanjutkan dengan finalisasi dokumen dan penetapan SK pedoman penyusunan rekomendasi.



Gambar 7. FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

5. Penerapan sistem pendekatan spasial dan Simulasi Penyusunan Rekomendasi

Pada minggu kelima, kegiatan difokuskan pada pemilihan isu strategis sebagai dasar penyusunan rekomendasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data spasial sesuai pedoman yang telah ditetapkan.



Gambar 8. Pemilihan Isu Strategis

6. Finalisasi Simulasi

Pada minggu keenam, kegiatan difokuskan pada penyempurnaan hasil simulasi dengan memastikan kesesuaiannya terhadap pedoman serta menyusun visualisasi berupa peta tematik, grafik, dan tabel sebagai pendukung rekomendasi.



Gambar 9. Finalisasi Kebijakan

7. Uji Coba Satu Dokumen Rekomendasi

Pada minggu ketujuh, kegiatan diarahkan untuk memperdalam pembahasan isu strategis yang paling aktual, dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data yang lebih komprehensif sebagai dasar penyusunan draft akhir dokumen rekomendasi.



Gambar 10. Uji Coba Rekomendasi

8. Finalisasi & Penyampaian Hasil Uji Coba

Pada minggu kedelapan, sebagai tahapan akhir, kegiatan difokuskan pada finalisasi dokumen rekomendasi hingga siap diserahkan kepada Kepala Daerah, serta penyusunan laporan capaian sebagai penutup seluruh rangkaian proyek perubahan.



Gambar 11. Finaslisasi dan Penyampaian Uji Coba

B. Manfaat Implementasi Tahapan Kegiatan

Implementasi tahapan kegiatan proyek perubahan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Melalui penerapan pedoman dan format baku berbasis data spasial, proses analisis rekomendasi menjadi lebih akurat, terukur, dan faktual. Data yang digunakan menggambarkan kondisi riil di lapangan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih objektif, tajam, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini memperkuat peran staf ahli sebagai penyedia masukan strategis bagi kepala daerah dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, implementasi kegiatan ini turut memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah. Keterlibatan berbagai OPD dalam penyusunan rekomendasi mendorong terbentuknya mekanisme kerja yang terpadu, saling mendukung, dan berbagi data secara lebih sistematis. Integrasi informasi dan komunikasi antarinstansi juga membantu mengurangi duplikasi program serta menumbuhkan budaya kerja kolaboratif berbasis data di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, proyek perubahan ini berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan anggaran pembangunan. Rekomendasi yang disusun secara berbasis bukti dan analisis spasial memungkinkan penentuan prioritas program secara lebih tepat sasaran, menghindari tumpang tindih antar-OPD, serta memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

C. Kepemimpinan Strategis

1. Pemanfaatan Peluang

Kepemimpinan strategis dalam proyek perubahan ini ditunjukkan melalui kemampuan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan pemerintahan daerah. Salah satu peluang utama adalah adanya kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim yang mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan peningkatan kualitas perumusan kebijakan publik. Selain itu, momentum kenaikan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Daerah menjadi peluang strategis untuk memperkuat peran staf ahli dalam menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat, berbasis bukti, dan mendukung tercapainya target reformasi birokrasi daerah. Melalui pemanfaatan peluang tersebut, proyek perubahan ini mampu berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan di tingkat daerah.

2. Optimalisasi Sumberdaya

Optimalisasi sumber daya dilakukan melalui pengelolaan potensi yang sudah ada, baik dari sisi SDM, data, maupun infrastruktur teknologi. Kolaborasi lintas OPD dimaksimalkan untuk menghimpun dan mengintegrasikan data spasial serta tematik yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Selain itu, kapasitas SDM ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan pendampingan, sehingga tim mampu mengoperasikan teknologi geospasial dengan baik. Upaya ini menunjukkan kemampuan kepemimpinan strategis dalam menggerakkan sumber daya terbatas menjadi kekuatan kolektif untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang presisi dan berdaya guna.

D. Implementasi Strategi Marketing

1. Peta Stakeholder

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, pemetaan stakeholder dilakukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap keberhasilan implementasi rekomendasi kebijakan berbasis spasial. Stakeholder utama meliputi Kepala Daerah sebagai pengambil keputusan tertinggi, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan sebagai pengusul rekomendasi, serta OPD teknis seperti Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Diskominfo, dan BPN yang menjadi sumber data dan mitra kolaborasi. Selain itu, akademisi dan lembaga profesional berperan sebagai mitra pendukung dalam validasi data dan penguatan analisis kebijakan.



Gambar 12. Peta Perubahan Stakeholder

Melalui peta stakeholder ini, hubungan antar pihak dapat dikelola secara lebih strategis: stakeholder dengan tingkat pengaruh tinggi dijadikan mitra utama dalam pengambilan keputusan, sementara stakeholder dengan kepentingan tinggi namun pengaruh terbatas diperkuat perannya melalui komunikasi intensif dan pelibatan aktif dalam proses implementasi.

2. Strategi Marketing

Strategi marketing dalam proyek perubahan ini diarahkan untuk membangun dukungan, kepercayaan, dan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap implementasi sistem rekomendasi kebijakan berbasis spasial. Langkah pertama dilakukan melalui Portal Data, Presentasi Langsung, dan Forum Koordinasi OPD. Portal Data menjadi media utama dalam memperkenalkan integrasi dan transparansi informasi lintas sektor. Presentasi langsung digunakan untuk menjelaskan manfaat dan capaian proyek secara konkret kepada pimpinan daerah dan OPD terkait. Sementara Forum Koordinasi OPD berfungsi sebagai sarana komunikasi, sinkronisasi program, dan penguatan komitmen kolaboratif antar perangkat daerah.

Selanjutnya, dukungan dan kepercayaan publik diperkuat melalui Workshop, Publikasi Media, dan Testimoni Pimpinan. Workshop dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis aparatur terhadap penggunaan data spasial dalam perumusan kebijakan. Publikasi media digunakan untuk menyebarkan informasi capaian proyek serta membangun citra positif pemerintah daerah dalam pengelolaan data berbasis bukti. Sedangkan testimoni pimpinan menjadi bentuk legitimasi sekaligus promosi keberhasilan proyek perubahan, yang diharapkan dapat meningkatkan replikasi dan keberlanjutan implementasi di masa mendatang.

E. Keberlanjutan Proyek Perubahan

1. Jangka Menengah (1 Tahun)

Dalam jangka menengah (satu tahun ke depan), keberlanjutan proyek perubahan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas OPD, replikasi pendekatan, dan integrasi sistem agar manfaat proyek terus berlanjut. Penguatan koordinasi lintas OPD dilakukan melalui forum rutin untuk menjaga sinergi dan sinkronisasi program, sedangkan replikasi pendekatan diarahkan pada bidang kebijakan lain seperti sosial, lingkungan, dan ketahanan pangan agar metode rekomendasi berbasis

spasial menjadi standar dalam proses pengambilan keputusan di berbagai sektor. Integrasi data spasial juga dilakukan ke dalam sistem perencanaan daerah agar setiap kebijakan dan program memiliki dasar analisis yang lebih akurat dan terukur.

Selain itu, dilakukan penyusunan laporan evaluasi tengah tahun untuk menilai efektivitas penerapan rekomendasi serta pengembangan dashboard sederhana berbasis spasial sebagai media visualisasi data dan rekomendasi kebijakan. Dashboard ini berfungsi membantu pimpinan daerah dan OPD memantau kondisi wilayah, menganalisis tren pembangunan, serta mengambil keputusan dengan lebih cepat dan berbasis data aktual.

2. Jangka Panjang (2 Tahun)

Dalam jangka panjang (dua tahun ke depan), fokus keberlanjutan diarahkan pada integrasi penuh pendekatan spasial ke dalam dokumen perencanaan tahunan daerah, sehingga seluruh proses perumusan kebijakan dapat berbasis data geospasial secara sistematis. Digitalisasi sistem rekomendasi staf ahli dilakukan secara menyeluruh agar seluruh tahapan analisis, penyusunan, hingga penyampaian rekomendasi kebijakan dapat dilakukan secara efisien dan terdokumentasi dalam satu platform digital terpadu.

Selain itu, akan diwujudkan konektivitas penuh antara sistem rekomendasi spasial dengan data spasial OPD teknis, sehingga alur informasi menjadi lebih cepat, akurat, dan saling terintegrasi. Upaya monitoring terhadap kualitas rekomendasi spasial juga dilaksanakan secara berkala sebagai mekanisme kontrol mutu dan pembelajaran berkelanjutan. Hasil dari implementasi ini akan menjadi dasar untuk mengusulkan replikasi pendekatan ke seluruh kebijakan lintas sektor, agar manfaat transformasi berbasis spasial dapat dirasakan secara luas di seluruh perangkat daerah.

F. Pemberdayaan Organisasi Pemberlajaran

1. Pengembangan Kompetensi Pihak Terdampak

Pengembangan kompetensi pihak terdampak merupakan langkah strategis

untuk membangun organisasi yang adaptif dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan aparatur dalam memahami, mengelola, serta menganalisis data spasial sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan relevan.

Melalui serangkaian pelatihan, pendampingan, dan praktik langsung, para peserta dibekali keterampilan dalam mengolah dan memanfaatkan data spasial untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat budaya kolaboratif dan inovatif di lingkungan pemerintah daerah, sehingga proses penyusunan rekomendasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berdampak bagi masyarakat.

2. Strategi Pengembangan Potensi Diri

Strategi ini diarahkan untuk membentuk aparatur yang berintegritas tinggi, mampu bekerja sama secara efektif, serta adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan potensi diri dilakukan melalui kegiatan workshop dan pelatihan yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

Selain itu, kegiatan ini mendorong peserta untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas unit kerja, sehingga tercipta sinergi yang produktif dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan. Pelatihan juga berfokus pada penguatan kemampuan dalam mengelola perubahan, baik dari sisi teknis maupun manajerial, agar aparatur mampu menghadapi dinamika kebijakan dengan sikap terbuka, inovatif, dan solutif.

G. Mata Pelatihan Pilihan

1. Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi

Pelatihan ini diperlukan untuk membangun kemampuan aparatur dalam menciptakan kolaborasi yang harmonis dan produktif antar generasi di lingkungan

kerja, sehingga tercipta sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas organisasi.

2. Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pelatihan ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengenali, mencegah, dan mengelola konflik kepentingan secara etis dan profesional guna menjaga integritas serta objektivitas dalam pengambilan kebijakan.

3. Keterampilan Digital Dalam Penyusunan Kebijakan

Pelatihan ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi dan data digital guna menghasilkan analisis yang lebih akurat serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proyek perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Staf Ahli dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang akurat, terukur, dan berbasis bukti melalui pendekatan spasial. Implementasi inovasi REKOMSPAS mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan penataan ruang. Keberadaan tim penyusun rekomendasi, pedoman baku, serta alat bantu analisis spasial telah menciptakan mekanisme kerja yang lebih terarah, kolaboratif, dan terintegrasi lintas OPD. Hasilnya, rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dengan kondisi wilayah, mengurangi risiko tumpang tindih kebijakan, serta mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data yang transparan dan berkelanjutan.

B. Saran

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan hasil proyek perubahan dan memastikan penerapan rekomendasi berbasis spasial berjalan efektif, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat dijadikan arahan tindak lanjut, antara lain:

- Tetapkan SK Tim Penyusun dan Pedoman Rekomendasi sebagai dasar kelembagaan berkelanjutan.
- Perluas penerapan pendekatan spasial ke bidang kebijakan lain.
- Tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan.
- Perkuat integrasi data spasial lintas OPD untuk efisiensi kebijakan.
- Lakukan monitoring dan evaluasi rutin guna menjaga keberlanjutan dan kualitas hasil.